

ABSTRAK

Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah penyerobotan tanah milik orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja baik dilakukan perorangan maupun sekelompok orang. Penyerobotan tanah merupakan suatu bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyerobotan tanah, untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pengaturan hukum atas tindak pidana penyerobotan tanah terhadap putusan No.121/PID.B/2015/PN.Gto. dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan No.121/PID.B/2015/PN.Gto.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Teori yang dipakai untuk menganalisis teori penegakan hukum dan teori penyelesaian sengketa.

Berdasarkan penelitian menghasilkan kesimpulan: Faktor yang menjadi pendorong terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas hak pemilikan atau penguasaan tanah di kalangan masyarakat, adanya pihak yang bermotif tertentu terhadap tanah yang dianggap tidak mempunyai perlindungan hukum. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, di antaranya : Pasal 167 KUHP dan Pasal 385 KUHP. Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis, filosofis dan yuridis.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah

ABSTRACT

One of the land conflicts that often occurs is the grabbing of land belonging to other people, whether intentional or unintentional, either by individuals or by groups of people. Land grabbing is a form of taking the rights of others against the law. This study aims to identify and analyze the factors that cause land grabbing, to identify and explain the form of legal arrangements for the criminal act of land grabbing against decision No.121 / PID.B / 2015 / PN.Gto. and to analyze the judges' legal considerations regarding the settlement of the criminal act of land grabbing in decision No. 121 / PID.B / 2015 / PN.Gto.

This study uses a normative juridical approach, namely a legal research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material for research. The theory used to analyze law enforcement theory and dispute resolution theory.

Based on the research, the conclusion is that: The factors driving the crime of land grabbing are the lack of awareness of the importance of legal protection of land ownership or control rights among the community, the existence of parties with certain motives against land that are considered to have no legal protection. Crimes against land grabbing are also regulated in the Criminal Code (KUHP), which is regulated in several articles in the KUHP, including: Article 167 of the Criminal Code and Article 385 of the Criminal Code. In deciding a case a judge must consider sociological, philosophical and juridical aspects.

Keywords: Judge's Consideration, Crime, Land Grabbing